

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers
- C.S.T.Kansil, 1982, Praktek Hukum Peraturan Perundangan Di Indonesia, Jakarta: Erlangga,
- Handyaningrat, Soewarno, 1994, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : CV.Haji Masagung.
- Miftah Thoha, 2014, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Jakarta: Kencana
- Muhammad Erwin, 2012, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: Rajawali Pers
- M.Manullang, 1995, Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Philipus, 1999, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Prayudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, ,Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), Jakarta: Rajawali Pers
- Saiful Anwar, 2004, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Glora Madani Press
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1985, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Djambatan,
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Sri Hartini.dkk, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sujanto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Suratman dan Philip Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Alfabeta,

Tim Penyusun Kamus, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Titik Triwulan T, 2011, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group

Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafindo

### **Sumber Jurnal dan Penelitian**

Dicky A Saputro, Sudarsono, dan Lutfi Efendi, Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014

Titin Fatimah dan Gusminarti, 2015, Status Hukum Tenaga Honorer Setelah Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Andalas

### **Sumber Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden Nomor 159 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Surat Edaran Menteri Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendataan tenaga Honorer Yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintahan

Surat Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, 800-632 Tahun 2011, dan 141/PMK.01/2011 Tentang Penundaan Sementara Penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS dari Tenaga Honorer

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kota Padang

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

#### **Sumber Internet**

<http://eprints.uns.ac.id/263/1/170312311201011381.pdf>

[www.isomwebs.net/artikel/2011/10/latar-belakang-amandemen-uud-1945/](http://www.isomwebs.net/artikel/2011/10/latar-belakang-amandemen-uud-1945/)

[www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

[www.bkd.padang.go.id](http://www.bkd.padang.go.id)

[e-jurnal.uajy.ac.id](http://e-jurnal.uajy.ac.id)

[www.seputarpengertian.co.id](http://www.seputarpengertian.co.id)

[www.tesishukum.com](http://www.tesishukum.com)